

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Lutfiah Asilah M^{1(a)}, Erfina^{2(b)}, Muhammad Ikbal^{3(c)}

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

^{a)}21009.lutfiahasilah@gmail.com, ^{b)}erfinafisip.05@gmail.com, ^{c)}iqbal.sidrap@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

24-08-2025

Diterbitkan Online:

31-03-2026

Kata Kunci:

Strategi Pemerintah,

Penanggulangan Kemiskinan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan jumlah responden sebanyak 100 orang yang dipilih melalui teknik random sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan IBM SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, dengan kontribusi pengaruh sebesar 95,5%. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan dan program yang dirancang pemerintah daerah telah berjalan efektif serta memberikan dampak nyata dalam menurunkan tingkat kemiskinan di lapangan. Artinya, semakin tepat perencanaan dan pelaksanaan strategi yang dilakukan, semakin besar pula keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa faktor utama yang mendukung keberhasilan strategi tersebut, yaitu kondisi lingkungan (25%), kualitas sumber daya manusia (21%), dan kepemimpinan (24%), dengan rata-rata capaian pada kategori baik sebesar 70%.

Keywords:

Government Strategy, Poverty Alleviation

Corresponding Author:

21009.lutfiahasilah@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the local government's strategy for poverty alleviation in Sidenreng Rappang Regency. The research employed a descriptive quantitative approach involving 100 respondents selected through random sampling. Data were collected through observation, questionnaires, and literature review, and were analyzed using simple linear regression with the assistance of IBM SPSS version 26. The findings indicate that the government's strategy has a strong and significant influence on poverty alleviation, contributing 95.5% to the reduction of poverty levels. This result demonstrates that the policies and programs implemented by the local government have been effective and have produced tangible impacts in reducing poverty at the community level. In substantive terms, the rejection of the null hypothesis confirms that well-planned and properly implemented government strategies directly enhance community welfare and accelerate poverty reduction outcomes. Furthermore, several key factors were identified as supporting the effectiveness of these strategies, including environmental conditions (25%), human resource quality (21%), and leadership (24%), with an overall average achievement categorized as good (70%).

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v8i1.1374>

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan global yang hingga kini menjadi fokus utama pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia (UNDP, 2020). Dalam skala internasional, laporan United Nations Development Programme (UNDP, 2020) mencatat bahwa sekitar 9,2% populasi dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan internasional sebesar 1,90 USD per hari. Indonesia, meskipun telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa dekade terakhir, tetap menghadapi tantangan dalam mengatasi kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,3% atau sekitar 25 juta orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya bersifat inklusif dan belum mampu menjangkau kelompok rentan secara merata, khususnya masyarakat pedesaan dan petani kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Di tingkat nasional, upaya pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka panjang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, termasuk melalui program pengentasan kemiskinan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi di tingkat daerah, mengingat karakteristik dan tantangan yang berbeda di setiap wilayah (Bappenas, 2020). Dalam praktiknya, kebijakan sering kali dirancang secara makro dan administratif, sementara realitas kemiskinan di daerah bersifat kontekstual dan multidimensional, sehingga diperlukan penyesuaian strategi berdasarkan kebutuhan riil masyarakat setempat.

Dalam konteks Kabupaten Sidenreng Rappang, yang terletak di Sulawesi Selatan, permasalahan kemiskinan memiliki dimensi yang kompleks. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris dengan kontribusi besar dari sektor pertanian. Namun, sektor ini masih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim, yang berdampak langsung pada pendapatan masyarakat. Berdasarkan laporan BPS Kabupaten Sidenreng Rappang (2023), tingkat kemiskinan di daerah ini mencapai 8,5%, yang sebagian besar terjadi di wilayah pedesaan. Tantangan utama mencakup

terbatasnya akses pendidikan, layanan kesehatan yang kurang memadai, serta ketimpangan distribusi pendapatan (Bappeda Sidenreng Rappang, 2022). Selain itu, rendahnya akses terhadap permodalan, teknologi pertanian, dan pasar yang stabil semakin memperkuat kerentanan ekonomi petani kecil sebagai kelompok rentan utama di wilayah ini.

Lebih jauh, data menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagian besar terdiri dari petani kecil, buruh tani, dan pekerja informal yang tidak memiliki pendapatan tetap. Ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian semakin memperumit situasi, terutama karena risiko gagal panen akibat perubahan iklim (Todaro & Smith, 2012). Meski pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program seperti pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, dan peningkatan akses pendidikan, efektivitas program-program ini masih perlu dievaluasi. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sidenreng Rappang (2023), jumlah penduduk miskin di kabupaten ini menunjukkan tren fluktuasi, dari 15.250 jiwa (5,04%) pada tahun 2021 menjadi 15.750 jiwa (5,14%) pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkan pemerintah daerah belum sepenuhnya berhasil menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mengatasi akar persoalan struktural kemiskinan pedesaan.

Dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Strategi-strategi tersebut antara lain berupa peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, dan penyediaan bantuan sosial kepada keluarga miskin. Meskipun demikian, hasil yang dicapai masih belum optimal, dan kemiskinan masih menjadi masalah utama yang belum teratasi. Secara empiris, strategi yang dijalankan cenderung berfokus pada bantuan sosial jangka pendek dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil petani kecil seperti stabilitas harga hasil pertanian, perlindungan risiko gagal panen, akses permodalan berkelanjutan, serta penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan

menganalisis dampaknya terhadap masyarakat. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang ada dapat menjawab tantangan kemiskinan di daerah ini, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara desain kebijakan dan kondisi faktual masyarakat pedesaan.

Berikut jumlah dan persentase garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang:

Tabel 1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Garis kemiskinan
2020	15.360	5,05	349.452
2021	15.250	5,04	360.591
2022	15.560	5,11	383.134
2023	15.750	5,14	421.321

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang tABE tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel di atas, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 sebesar 15.360 jiwa atau 5,05% dan turun menjadi 15.250 jiwa atau 5,04% pada tahun 2021. Memasuki tahun 2022, jumlah penduduk miskin naik menjadi 15.560 jiwa atau 5,11% dan kembali meningkat menjadi 15.750 jiwa atau 5,14% pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai program telah dijalankan, dampaknya belum signifikan dan berkelanjutan. Selain itu, kenaikan garis kemiskinan setiap tahun menunjukkan meningkatnya biaya hidup masyarakat, sehingga memperkuat urgensi evaluasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Selain menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, Kabupaten Sidenreng Rappang juga memiliki permasalahan utama berupa kurangnya efektivitas implementasi strategi pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah penduduk miskin meskipun berbagai program telah dilaksanakan. Kesenjangan distribusi bantuan sosial, data yang kurang akurat mengenai masyarakat miskin, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi kendala yang signifikan (BPS, 2023; Bappeda Sidenreng Rappang, 2022). Kondisi ini memperlihatkan adanya gap antara pendekatan kebijakan yang bersifat top-down dengan

kebutuhan riil masyarakat pedesaan yang memerlukan pendekatan partisipatif dan berbasis potensi lokal.

Penelitian ini berjudul “Strategi Pemerintah Daerah terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang” yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah, mengidentifikasi hambatan, dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menjadi urgensi karena tanpa evaluasi mendalam berbasis data dan teori, program pengentasan kemiskinan berisiko hanya bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh akar permasalahan struktural kemiskinan pedesaan.

Pendekatan terhadap pengentasan kemiskinan juga memerlukan landasan teori yang kuat dan jelas. Teori Kemiskinan Struktural menjelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan struktur ekonomi dan distribusi sumber daya, bukan semata-mata karena rendahnya kemampuan individu. Dalam konteks ini, petani kecil menghadapi keterbatasan akses lahan, modal, dan pasar. Teori Capability Approach yang dikemukakan oleh Amartya Sen dan dikembangkan oleh Martha Nussbaum (2000) menekankan bahwa kemiskinan adalah keterbatasan kemampuan (capabilities) untuk mencapai kehidupan yang layak, sehingga strategi pengentasan harus berorientasi pada peningkatan kapasitas dan akses terhadap peluang ekonomi. Selain itu, teori Kapital Sosial dari Robert Putnam (1993) menyatakan bahwa jaringan sosial, kepercayaan, dan kolaborasi antaraktor dapat mempercepat pengentasan kemiskinan melalui partisipasi aktif masyarakat.

Dengan menggunakan pendekatan berbasis teori tersebut, penelitian ini berupaya mengevaluasi strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara lebih komprehensif. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang ada, tetapi juga menganalisis kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan kebutuhan riil petani kecil sebagai kelompok rentan utama, serta memberikan rekomendasi strategis berbasis pemberdayaan ekonomi lokal, partisipasi masyarakat, dan penguatan struktur ekonomi pedesaan. Dengan solusi yang berbasis data dan kolaborasi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyusun kebijakan

pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, kontekstual, dan berkelanjutan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah serta menganalisis hubungan antara strategi pemerintah daerah dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan sejak diterbitkannya surat izin penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu strategi pemerintah daerah sebagai variabel independen (X) dan pengentasan kemiskinan sebagai variabel dependen (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berjumlah 15.750 orang. Sampel penelitian ditentukan sebanyak 100 responden yang terdiri atas laki-laki dan perempuan. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan populasi serta efisiensi penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan dokumentasi yang bersumber dari laporan resmi serta data statistik terkait kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik analisis data meliputi analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden dan distribusi jawaban. Uji validitas dilakukan dengan melihat nilai korelasi antaritem dengan ketentuan $r \geq 0,3$, sedangkan uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha dengan kriteria $\geq 0,7$. Untuk menguji hubungan antara variabel independen dan dependen digunakan analisis regresi linear sederhana dengan persamaan $Y = a + bX$. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, serta uji F untuk mengetahui kelayakan model regresi. Hipotesis nol (H_0) menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi pemerintah daerah terhadap pengentasan kemiskinan, sedangkan hipotesis alternatif (H_1) menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan. Keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada nilai signifikansi ($\alpha = 0,05$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Faktor yang Mempengaruhi Strategi

a) Kondisi Lingkungan

Tabel 1. Tanggapan Responden Tentang Kondisi Lingkungan yang Mendukung Aktivitas Ekonomi Masyarakat

No	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase %
		(b)	(f)	(f×b)	
1.	Sangat Setuju	5	28	140	28%
2.	Setuju	4	43	172	43%
3.	Netral	3	14	42	14%
4.	Tidak Setuju	2	11	22	11%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	4	4	4%
Jumlah			100	380	100%

Rata-rata skor = $\frac{\sum f \cdot X}{N} = \frac{380}{100} = 3,8$

Rata-rata persentase = $\frac{3,8}{5} \times 100\% = 76\%$

Sumber: Olah data kuesioner, Juni 2025

Berdasarkan hasil Tabel 1 terhadap 100 responden, sebanyak 43% menyatakan “Setuju” dan 28% menyatakan “Sangat Setuju”. Sebanyak 14% memilih “Netral”, 11% “Tidak Setuju”, dan 4% “Sangat Tidak Setuju”. Total skor yang diperoleh adalah 380 dengan rata-rata skor 3,8. Jika dikonversikan ke dalam persentase, diperoleh nilai 76% yang termasuk dalam kategori “Baik”.

Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan dinilai cukup mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Artinya, secara umum masyarakat merasakan bahwa faktor lingkungan bukan menjadi hambatan utama dalam mendorong kegiatan ekonomi.

Tabel 2. Tanggapan Responden Tentang Keetrediaan Fasilitas Umum (Jalan, Air Bersih, dan Listrik)

No	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase %
		(b)	(f)	(f×b)	
1.	Sangat Setuju	5	20	100	20%
2.	Setuju	4	49	196	49%
3.	Netral	3	20	60	20%
4.	Tidak Setuju	2	9	18	9%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	2	2	2%
Jumlah			100	376	100%

Rata-rata skor = $\frac{\sum f \cdot X}{N} = \frac{376}{100} = 3,76$

Rata-rata persentase = $\frac{3,76}{5} \times 100\% = 75\%$

Sumber: Olah data kuesioner, Juni 2025

Tabel 2 menyajikan tanggapan dari 100 responden, yaitu 49% menyatakan “Setuju” dan 20% menyatakan “Sangat Setuju”. Sebanyak 20% responden memilih “Netral”, 9% “Tidak Setuju”, dan 2% menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Total skor keseluruhan yang diperoleh

adalah 376 dengan rata-rata skor 3,76. Jika dikonversikan ke dalam persentase, rata-rata tanggapan responden adalah sebesar 75% yang termasuk dalam kategori “Baik”.

Meskipun secara kategori tergolong “Baik”, nilai ini masih menunjukkan adanya 31% responden yang berada pada posisi netral hingga tidak setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa infrastruktur belum sepenuhnya merata dan optimal. Infrastruktur yang belum memadai dapat menghambat distribusi barang dan jasa, meningkatkan biaya produksi, serta membatasi akses masyarakat terhadap pasar. Dengan demikian, meskipun faktor lain dinilai baik, keterbatasan infrastruktur berpotensi mengurangi daya ungkit strategi ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah. Infrastruktur yang tidak merata menyebabkan aktivitas ekonomi tidak berkembang secara maksimal dan gagal menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

b) Kualitas SDM

Tabel 3. Tanggapan Responden Tentang Keterampilan Kerja Masyarakat

No	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase %
		(b)	(f)	(f×b)	
1.	Sangat Setuju	5	15	75	15%
2.	Setuju	4	43	212	43%
3.	Netral	3	26	78	26%
4.	Tidak Setuju	2	14	28	14%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	2	2	2%
Jumlah			100	395	100%
<p>Rata-rata skor = $\frac{\sum F.X}{N} = \frac{365}{100} = 3,95$</p> <p>Rata-rata persentase = $\frac{3,95}{5} \times 100\% = 79\%$</p>					

Sumber: Olah data kuesioner, Juni 2025

Tabel 3 menyajikan tanggapan dari 100 responden, yaitu 43% menyatakan “Setuju” dan 15% menyatakan “Sangat Setuju”. Sebanyak 26% responden memilih “Netral”, 14% “Tidak Setuju”, dan 2% menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Total skor keseluruhan yang diperoleh adalah 395 dengan rata-rata skor 3,95. Jika dikonversikan ke dalam persentase, rata-rata tanggapan responden adalah sebesar 79% yang termasuk dalam kategori “Baik”.

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menilai keterampilan kerja sudah cukup memadai. Namun, penilaian ini belum tentu mencerminkan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan tanpa dukungan pelatihan yang sistematis.

Tabel 4. Tanggapan Responden Tentang Pelatihan atau Kursus untuk Peningkatan Kualitas SDM

No	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase %
		(b)	(f)	(f×b)	
1.	Sangat Setuju	5	5	25	5%
2.	Setuju	4	24	96	24%
3.	Netral	3	16	48	16%
4.	Tidak Setuju	2	27	54	27%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	28	28	28%
Jumlah			100	251	100%
<p>Rata-rata skor = $\frac{\sum F.X}{N} = \frac{251}{100} = 2,51$</p> <p>Rata-rata persentase = $\frac{2,51}{5} \times 100\% = 50\%$</p>					

Sumber: Olah data kuesioner, Juni 2025

Tabel 4 menyajikan tanggapan dari 100 responden, yaitu 24% menyatakan “Setuju” dan 5% menyatakan “Sangat Setuju”. Sebanyak 16% responden memilih “Netral”, 27% “Tidak Setuju”, dan 28% menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Total skor keseluruhan yang diperoleh adalah 251 dengan rata-rata skor 2,51. Jika dikonversikan ke dalam persentase, rata-rata tanggapan responden adalah sebesar 50% yang termasuk dalam kategori “Kurang Baik”.

Indikator ini merupakan skor terendah dalam keseluruhan variabel. Rendahnya penilaian terhadap pelatihan keterampilan kerja menunjukkan bahwa program peningkatan kapasitas SDM belum berjalan optimal, baik dari sisi frekuensi, kualitas, maupun relevansi dengan kebutuhan pasar kerja. Kondisi ini menyebabkan keterampilan masyarakat tidak berkembang secara adaptif terhadap perubahan ekonomi.

Meskipun keterampilan kerja dinilai “Baik” pada Tabel 3, tanpa adanya pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM akan stagnan. Pelatihan merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing tenaga kerja. Ketika sektor ini lemah, maka strategi ekonomi tidak memiliki fondasi sumber daya manusia yang kuat. Inilah alasan utama mengapa sektor pelatihan keterampilan kerja gagal menjadi penggerak ekonomi, meskipun variabel lain menunjukkan hasil yang relatif baik.

c) Kepemimpinan

Tabel 5. Tanggapan Responden Tentang Keaktifan Pemimpin Daerah dalam Menangani Masalah Kemiskinan

No	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase %
		(b)	(f)	(f·b)	
1.	Sangat Setuju	5	18	90	18%
2.	Setuju	4	41	164	41%
3.	Netral	3	21	63	21%
4.	Tidak Setuju	2	17	34	17%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	3	3	3%
Jumlah			100	354	100%

Rata-rata skor = $\frac{\sum f \cdot X}{N} = \frac{354}{100} = 3,54$

Rata-rata persentase = $\frac{3,54}{5} \times 100\% = 71\%$

Sumber: Olah data kuesioner, Juni 2025

Tabel 5 menyajikan tanggapan dari 100 responden yaitu 41% menyatakan “Setuju”, sementara 18% menyatakan “Sangat Setuju”. Sebanyak 21% responden memilih “Netral”, 17% “Tidak Setuju”, dan 3% menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Total skor keseluruhan yang diperoleh adalah 354, dengan rata-rata skor 3,54. Jika dikonversikan ke dalam persentase, rata-rata tanggapan responden adalah sebesar 71% yang termasuk dalam kategori “Baik”

Keaktifan ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, keaktifan saja belum menjamin efektivitas kebijakan. Dampak nyata sangat bergantung pada implementasi program dan konsistensi pelaksanaannya. Apabila sektor pelatihan dan infrastruktur tidak diperkuat, maka keaktifan kepemimpinan tidak akan mampu memberikan perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Tabel 6. Tanggapan Responden Tentang Kebijakan Pemimpin Daerah yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin

No	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase %
		(b)	(f)	(f·b)	
1.	Sangat Setuju	5	14	70	14%
2.	Setuju	4	56	224	56%
3.	Netral	3	18	54	18%
4.	Tidak Setuju	2	12	24	12%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0%
Jumlah			100	372	100%

Rata-rata skor = $\frac{\sum f \cdot X}{N} = \frac{372}{100} = 3,72$

Rata-rata persentase = $\frac{3,72}{5} \times 100\% = 74\%$

Sumber: Olah data kuesioner, Juni 2025

Tabel 6 menyajikan tanggapan dari 100 responden yaitu 56% menyatakan “Setuju”, sementara 14% menyatakan “Sangat Setuju”. Sebanyak 18% responden memilih “Netral”, 12% “Tidak Setuju”, dan 0% menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Total skor keseluruhan yang diperoleh adalah 372, dengan rata-rata skor 3,72. Jika dikonversikan ke dalam persentase, rata-rata tanggapan responden adalah sebesar 74% yang termasuk dalam kategori “Baik”

Hal ini menunjukkan adanya komitmen normatif dalam penyusunan kebijakan. Namun demikian, keberpihakan kebijakan perlu diwujudkan dalam bentuk program konkret yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam peningkatan keterampilan dan perbaikan infrastruktur. Tanpa implementasi yang kuat pada dua sektor tersebut, keberpihakan kebijakan hanya bersifat administratif dan belum sepenuhnya berdampak pada penguatan ekonomi.

Tabel 7. Rekapitulasi Indikator Faktor yang Mempengaruhi Strategi

No	Indikator faktor-faktor yang mempengaruhi strategi	Rata-rata persentase
1	Kondisi Lingkungan	75%
2	Kualitas SDM	64%
3	Kepemimpinan	72%
Jumlah		211/3
Persentase		70%

Dengan mengakumulasi hasil rata-rata persentase dari enam item pertanyaan pada indikator faktor-faktor yang mempengaruhi strategi, maka di dapatkan hasil rata-rata persentase 70%. Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada indikator ini berada pada kategori “Baik”.

Adapun keseluruhan frekuensi dari faktor-faktor yang mempengaruhi strategi adalah sebesar 2.089, untuk mengetahui jumlah persentase maka dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Hasil Ideal} &= \frac{\text{Total Frekuensi Jawaban}}{\text{Bobot Tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}} \\ &= \frac{2.089}{5 \times 6 \times 100} = \frac{2.089}{3.000} = 0,6963 \times 100\% = 70\% \end{aligned}$$

Jadi nilai persentase dari indikator Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi sebesar 70%

dari 100% yang di harapkan, maka ini tergolong dalam kategori “Baik”.

Namun, angka rata-rata ini menutupi adanya ketimpangan antarindikator. Nilai pelatihan keterampilan kerja yang sangat rendah menjadi titik lemah utama. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa strategi belum terintegrasi secara seimbang. Rata-rata yang baik tidak dapat dijadikan indikator keberhasilan apabila masih terdapat sektor fundamental yang lemah.

Indikator Strategi Pemerintah Daerah

a) Kebijakan Strategis

Tabel 8. Tanggapan responden tentang kebijakan strategis yang berdasarkan data kemiskinan

No	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase %
		(b)	(f)	(f×b)	
1.	Sangat Setuju	5	23	115	23%
2.	Setuju	4	59	236	59%
3.	Netral	3	12	36	12%
4.	Tidak Setuju	2	6	12	6%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0%
Jumlah			100	399	100%

Rata-rata skor = $\frac{\sum FX}{N} = \frac{399}{100} = 3,99$

Rata-rata persentase = $\frac{3,99}{5} \times 100\% = 80\%$

Sumber: Olah data kuesioner, Juni 2025

Tabel 8. menyajikan tanggapan dari 100 responden yaitu 59% menyatakan “Setuju”, sementara 23% menyatakan “Sangat Setuju”. Sebanyak 12% responden memilih “Netral”, 6% “Tidak Setuju”, dan 0% menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Total skor keseluruhan yang diperoleh adalah 399, dengan rata-rata skor 3,99. Jika dikonversikan ke dalam persentase, rata-rata tanggapan responden adalah sebesar 80% yang termasuk dalam kategori “Baik”.

Perencanaan berbasis data merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penyusunan strategi. Namun, perencanaan yang baik harus diikuti dengan implementasi yang efektif. Apabila kebijakan berbasis data tidak diiringi dengan penguatan pelatihan dan infrastruktur, maka hasilnya tidak akan optimal.

Tabel 9. Tanggapan Responden Tentang Kesesuaian Program Pengentasan Kemiskinan dengan Kebutuhan Masyarakat Miskin

No	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase %
		(b)	(f)	(f×b)	
1.	Sangat Setuju	5	22	110	22%
2.	Setuju	4	48	192	48%
3.	Netral	3	23	69	23%
4.	Tidak Setuju	2	6	12	6%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	1	1	1%
Jumlah			100	384	100%

Rata-rata skor = $\frac{\sum FX}{N} = \frac{384}{100} = 3,84$

Rata-rata persentase = $\frac{3,84}{5} \times 100\% = 77\%$

Sumber : Olah data kuesioner, Juni 2025

Tabel 9. menyajikan tanggapan dari 100 responden yaitu 48% menyatakan “Setuju”, sementara 22% menyatakan “Sangat Setuju”. Sebanyak 23% responden memilih “Netral”, 6% “Tidak Setuju”, dan 1% menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Total skor keseluruhan yang diperoleh adalah 384, dengan rata-rata skor 3,84. Jika dikonversikan ke dalam persentase, rata-rata tanggapan responden adalah sebesar 77% yang termasuk dalam kategori “Baik”.

Meskipun demikian, kesesuaian program belum tentu menghasilkan peningkatan ekonomi yang signifikan apabila masyarakat tidak memiliki keterampilan yang cukup atau akses terhadap fasilitas yang memadai. Program yang sesuai harus didukung oleh kapasitas pelaksana dan penerima manfaat yang kuat.

b) Keterlibatan Masyarakat

Tabel 10. Tanggapan Responden Tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan

No	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase %
		(b)	(f)	(f×b)	
1.	Sangat Setuju	5	14	70	14%
2.	Setuju	4	39	156	39%
3.	Netral	3	23	69	23%
4.	Tidak Setuju	2	24	48	24%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0%
Jumlah			100	343	100%

Rata-rata skor = $\frac{\sum FX}{N} = \frac{343}{100} = 3,43$

Rata-rata persentase = $\frac{3,43}{5} \times 100\% = 69\%$

Sumber: Olah data kuesioner, Juni 2025

Tabel 10 menyajikan tanggapan dari 100 responden yaitu 39% menyatakan “Setuju”, sementara 14% menyatakan “Sangat Setuju”. Sebanyak 23% responden memilih “Netral”, 24% “Tidak Setuju”, dan 0% menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Total skor keseluruhan yang diperoleh adalah 343, dengan rata-rata skor 3,43. Jika dikonversikan ke dalam persentase, rata-rata tanggapan responden adalah sebesar 69% yang termasuk dalam kategori “Baik”.

Masih adanya responden yang tidak setuju menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum optimal. Rendahnya partisipasi bisa menjadi dampak dari kurangnya pelatihan dan minimnya dukungan fasilitas. Masyarakat cenderung kurang terlibat apabila tidak memiliki kapasitas yang memadai atau tidak merasakan manfaat langsung dari program.

Tabel 11. Tanggapan Responden Tentang Pelibatan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

No	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase %
		(b)	(f)	(f×b)	
1.	Sangat Setuju	5	7	35	7%
2.	Setuju	4	45	180	45%
3.	Netral	3	25	75	25%
4.	Tidak Setuju	2	20	40	20%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	3	3	3%
Jumlah			100	333	100%

Rata-rata skor = $\frac{\sum FX}{N} = \frac{333}{100} = 3,33$

Rata-rata persentase = $\frac{3,33}{5} \times 100\% = 67\%$

Sumber: Olah data kuesioner, Juni 2025

Tabel 11 menyajikan tanggapan dari 100 responden yaitu 45% menyatakan “Setuju”, sementara 7% menyatakan “Sangat Setuju”. Sebanyak 25% responden memilih “Netral”, 20% “Tidak Setuju”, dan 3% menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Total skor keseluruhan yang diperoleh adalah 333, dengan rata-rata skor 3,33. Jika dikonversikan ke dalam persentase, rata-rata tanggapan responden adalah sebesar 67% yang termasuk dalam kategori “Baik”.

Meskipun termasuk kategori baik, masih terdapat 23% responden yang tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya inklusif dan merata. Keterlibatan yang belum optimal dapat berdampak pada kurang tepatnya implementasi kebijakan, terutama dalam sektor teknis seperti pelatihan kerja dan pembangunan infrastruktur.

c) Ketersediaan Infrastruktur

Tabel 12. Tanggapan responden tentang ketersediaan infrastruktur penunjang pengentasan kemiskinan

No	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase %
		(b)	(f)	(f×b)	
1.	Sangat Setuju	5	11	55	11%
2.	Setuju	4	28	112	4%
3.	Netral	3	18	54	18%
4.	Tidak Setuju	2	30	60	30%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	13	13	13%
Jumlah			100	294	100%

Rata-rata skor = $\frac{\sum FX}{N} = \frac{294}{100} = 2,94$

Rata-rata persentase = $\frac{2,94}{5} \times 100\% = 59\%$

Sumber : Olah data kuesioner, Juni 2025

Tabel 12 menyajikan tanggapan dari 100 responden yaitu 4% menyatakan “Setuju”, sementara 11% menyatakan “Sangat Setuju”. Sebanyak 18% responden memilih “Netral”, 30% “Tidak Setuju”, dan 13% menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Total skor keseluruhan yang diperoleh adalah 294, dengan rata-rata skor 2,94. Jika dikonversikan ke dalam persentase, rata-rata tanggapan responden adalah sebesar 59% yang termasuk dalam kategori “Kurang Baik”.

Infrastruktur belum memadai sebagai penunjang pengentasan kemiskinan. Tingginya ketidaksetujuan (43%) mengindikasikan bahwa masyarakat masih menghadapi kendala akses jalan, sarana produksi, fasilitas perdagangan, maupun layanan dasar lainnya. Infrastruktur yang lemah menyebabkan aktivitas ekonomi tidak berkembang optimal sehingga sektor ini gagal menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.

Tabel 13. Tanggapan Responden Tentang Upaya Perbaikan dan Penambahan Infrastruktur oleh Pemerintah Daerah

No	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase %
		(b)	(f)	(f×b)	
1.	Sangat Setuju	5	9	45	9%
2.	Setuju	4	25	100	25%
3.	Netral	3	15	45	15%
4.	Tidak Setuju	2	27	54	27%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	24	24	24%
Jumlah			100	268	100%

Rata-rata skor = $\frac{\sum FX}{N} = \frac{268}{100} = 2,68$

Rata-rata persentase = $\frac{2,68}{5} \times 100\% = 54\%$

Sumber : Olah data kuesioner, Juni 2025

Tabel 13 menyajikan tanggapan dari 100 responden yaitu 25% menyatakan “Setuju”, sementara 9% menyatakan “Sangat Setuju”. Sebanyak 15% responden memilih “Netral”, 27% “Tidak Setuju”, dan 24% menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Total skor keseluruhan yang diperoleh adalah 268, dengan rata-rata skor 2,68. Jika dikonversikan ke dalam persentase, rata-rata tanggapan responden adalah sebesar 54% yang termasuk dalam kategori “Kurang Baik”.

Persentase 54% mempertegas bahwa upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki dan menambah infrastruktur belum dirasakan secara signifikan. Mayoritas responden menunjukkan ketidakpuasan (51%). Hal ini menandakan bahwa program pembangunan belum berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan akses ekonomi masyarakat miskin.

Tabel 14. Rekapitulasi Indikator Strategi Pemerintah Daerah

No	Indikator Strategi Pemerintah	Rata-rata persentase
1.	Kebijakan Strategis	78%
2.	Keterlibatan Masyarakat	68%
3.	Ketersediaan Infrastruktur	56%
	Jumlah	202/3
	Persentase	67%

Dengan mengakumulasi hasil rata-rata persentase dari enam item pertanyaan pada indikator Strategi pemerintah, maka di dapatkan hasil rata-rata persentase 67%. Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada indikator ini berada pada kategori “Baik”.

Adapun keseluruhan frekuensi dari indikator strategi pemerintah adalah sebesar 2.021, untuk mengetahui jumlah persentase maka dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Hasil Ideal} &= \frac{\text{Total Frekuensi Jawaban}}{\text{Bobot Tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}} \\ &= \frac{2.021}{5 \times 6 \times 100} = \frac{2.021}{3.000} = 0,6736 \times 100\% = 67\% \end{aligned}$$

Indikator penanggulangan kemiskinan

- a) Pelatihan keterampilan kerja

Tabel 15. Tanggapan Responden Tentang Keikutsertaan dalam Pelatihan Keterampilan Kerja

No	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase %
		(b)	(f)	(f×b)	
1.	Sangat Setuju	5	6	30	6%
2.	Setuju	4	31	124	31%
3.	Netral	3	19	57	19%
4.	Tidak Setuju	2	19	38	19%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	25	25	25%
Jumlah			100	274	100%

Rata-rata skor = $\frac{\sum FX}{N} = \frac{274}{100} = 2,74$

Rata-rata persentase = $\frac{2,74}{5} \times 100\% = 55\%$

Sumber : Olah data kuesioner, Juni 2025

Tabel 15 menyajikan tanggapan dari 100 responden yaitu 31% menyatakan “Setuju”, sementara 6% menyatakan “Sangat Setuju”. Sebanyak 19% responden memilih “Netral”, 19% “Tidak Setuju”, dan 25% menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Total skor keseluruhan yang diperoleh adalah 274, dengan rata-rata skor 2,74. Jika dikonversikan ke dalam persentase, rata-rata tanggapan responden adalah sebesar 55% yang termasuk dalam kategori “Kurang Baik”.

Tingginya persentase “Sangat Tidak Setuju” menunjukkan rendahnya partisipasi atau akses masyarakat terhadap pelatihan. Hal ini mengindikasikan bahwa program belum menjangkau seluruh kelompok sasaran atau belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Akibatnya, pelatihan belum mampu menjadi penggerak ekonomi berbasis peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 16. Tanggapan Responden Tentang Manfaat Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Peningkatan Pendapatan

No	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase %
		(b)	(f)	(f×b)	
1.	Sangat Setuju	5	10	50	10%
2.	Setuju	4	31	124	31%
3.	Netral	3	25	75	25%
4.	Tidak Setuju	2	27	54	27%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	7	7	7%
Jumlah			100	310	100%

Rata-rata skor = $\frac{\sum FX}{N} = \frac{310}{100} = 3,1$

Rata-rata persentase = $\frac{3,1}{5} \times 100\% = 62\%$

Sumber : Olah data kuesioner, Juni 2025

Tabel 16 menyajikan tanggapan dari 100 responden yaitu 31% menyatakan “Setuju”,

sementara 10% menyatakan “Sangat Setuju”. Sebanyak 25% responden memilih “Netral”, 27% “Tidak Setuju”, dan 7% menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Total skor keseluruhan yang diperoleh adalah 310, dengan rata-rata skor 3,1. Jika dikonversikan ke dalam persentase, rata-rata tanggapan responden adalah sebesar 62% yang termasuk dalam kategori “Baik”

Meskipun dinilai baik, angka 62% masih tergolong moderat. Terdapat 34% responden yang bersikap netral atau tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa meskipun pelatihan berpotensi meningkatkan pendapatan, dampaknya belum merata. Kemungkinan terdapat kendala pada kualitas materi, keberlanjutan pendampingan, atau akses permodalan setelah pelatihan.

b) Diversifikasi ekonomi

Tabel 17. Tanggapan Responden Tentang Dukungan Pemerintah Terhadap Diversifikasi Ekonomi Masyarakat

No	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase %
		(b)	(f)	(f·b)	
1.	Sangat Setuju	5	20	100	20%
2.	Setuju	4	50	200	50%
3.	Netral	3	18	54	18%
4.	Tidak Setuju	2	11	22	11%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	1	1	1%
Jumlah			100	377	100%

Rata-rata skor = $\frac{\sum f \cdot X}{N} = \frac{377}{100} = 3,77$

Rata-rata persentase = $\frac{3,77}{5} \times 100\% = 75\%$

Sumber : Olah data kuesioner, Juni 2025

Tabel 17 menyajikan tanggapan dari 100 responden yaitu 50% menyatakan “Setuju”, sementara 20% menyatakan “Sangat Setuju”. Sebanyak 18% responden memilih “Netral”, 11% “Tidak Setuju”, dan 1% menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Total skor keseluruhan yang diperoleh adalah 377, dengan rata-rata skor 3,77. Jika dikonversikan ke dalam persentase, rata-rata tanggapan responden adalah sebesar 75% yang termasuk dalam kategori “Baik”.

Nilai 75% menunjukkan bahwa dukungan pemerintah terhadap diversifikasi ekonomi sudah berjalan baik. Program ini dinilai membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha alternatif dan memperluas sumber pendapatan.

Tabel 18. Tanggapan Responden Tentang Dampak Diversifikasi Ekonomi Terhadap Kesejahteraan

No	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase %
		(b)	(f)	(f·b)	
1.	Sangat Setuju	5	8	40	8%
2.	Setuju	4	54	216	54%
3.	Netral	3	26	78	26%
4.	Tidak Setuju	2	11	22	11%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	1	1	1%
Jumlah			100	357	100%

Rata-rata skor = $\frac{\sum f \cdot X}{N} = \frac{357}{100} = 3,57$

Rata-rata persentase = $\frac{3,57}{5} \times 100\% = 71\%$

Sumber : Olah data kuesioner, Juni 2025

Tabel 18 menyajikan tanggapan dari 100 responden yaitu 54% menyatakan “Setuju”, sementara 8% menyatakan “Sangat Setuju”. Sebanyak 26% responden memilih “Netral”, 11% “Tidak Setuju”, dan 1% menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Total skor keseluruhan yang diperoleh adalah 357, dengan rata-rata skor 3,57. Jika dikonversikan ke dalam persentase, rata-rata tanggapan responden adalah sebesar 71% yang termasuk dalam kategori “Baik”.

Hasil ini menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada dukungan infrastruktur dan peningkatan keterampilan kerja agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.

c) Pemanfaatan Teknologi Digital

Tabel 19. Tanggapan Responden Terhadap Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Program Pengentasan Kemiskinan

No	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase %
		(b)	(f)	(f·b)	
1.	Sangat Setuju	5	2	10	2%
2.	Setuju	4	50	200	50%
3.	Netral	3	25	75	25%
4.	Tidak Setuju	2	21	42	21%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	2	2	2%
Jumlah			100	329	100%

Rata-rata skor = $\frac{\sum f \cdot X}{N} = \frac{329}{100} = 3,29$

Rata-rata persentase = $\frac{3,29}{5} \times 100\% = 66\%$

Sumber : Olah data kuesioner, Juni 2025

Tabel 19 menyajikan tanggapan dari 100 responden yaitu 50% menyatakan “Setuju”, sementara 2% menyatakan “Sangat Setuju”.

Sebanyak 25% responden memilih “Netral”, 21% “Tidak Setuju”, dan 2% menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Total skor keseluruhan yang diperoleh adalah 329, dengan rata-rata skor 3,29. Jika dikonversikan ke dalam persentase, rata-rata tanggapan responden adalah sebesar 66% yang termasuk dalam kategori “Baik”.

Pemanfaatan teknologi digital dinilai cukup baik, tetapi masih terdapat 23% responden yang tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital dan akses teknologi belum merata, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat miskin.

Tabel 20. Tanggapan Responden Tentang Kemudahan Akses Informasi Bantuan Sosial Melalui Teknologi Digital

No	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase %
		(b)	(f)	(f·b)	
1.	Sangat Setuju	5	15	75	15%
2.	Setuju	4	44	176	44%
3.	Netral	3	25	75	25%
4.	Tidak Setuju	2	14	28	14%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	2	2	2%
Jumlah			100	356	100%
Rata-rata skor = $\frac{\sum FX}{N} = \frac{356}{100} = 3,56$					
Rata-rata persentase = $\frac{3,56}{5} \times 100\% = 71\%$					

Sumber : Olah data kuesioner, Juni 2025

Tabel 20 menyajikan tanggapan dari 100 responden yaitu 44% menyatakan “Setuju”, sementara 15% menyatakan “Sangat Setuju”. Sebanyak 25% responden memilih “Netral”, 14% “Tidak Setuju”, dan 2% menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Total skor keseluruhan yang diperoleh adalah 356, dengan rata-rata skor 3,56. Jika dikonversikan ke dalam persentase, rata-rata tanggapan responden adalah sebesar 71% yang termasuk dalam kategori “Baik”

Hasil ini menunjukkan bahwa akses informasi bantuan sosial melalui teknologi digital relatif mudah dijangkau. Namun demikian, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

d) Kolaborasi lintas sektor

Tabel 21. Tanggapan Responden Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta, LSM, dan Masyarakat

No	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase %
		(b)	(f)	(f·b)	
1.	Sangat Setuju	5	5	25	5%
2.	Setuju	4	55	220	55%
3.	Netral	3	15	45	15%
4.	Tidak Setuju	2	23	46	23%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	2	2	2%
Jumlah			100	338	100%
Rata-rata skor = $\frac{\sum FX}{N} = \frac{338}{100} = 3,38$					
Rata-rata persentase = $\frac{3,38}{5} \times 100\% = 68\%$					

Sumber : Olah data kuesioner, Juni 2025

Tabel 21 menyajikan tanggapan dari 100 responden, yaitu 55% menyatakan “Setuju”, sementara 5% menyatakan “Sangat Setuju”. Sebanyak 15% responden memilih “Netral”, 23% “Tidak Setuju”, dan 2% menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Total skor keseluruhan yang diperoleh adalah 338, dengan rata-rata skor 3,38. Jika dikonversikan ke dalam persentase, rata-rata tanggapan responden adalah sebesar 68% yang termasuk dalam kategori “Baik”.

Tabel 22. Tanggapan Responden Tentang Dampak Kolaborasi Lintas Sektor Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan

No	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase %
		(b)	(f)	(f·b)	
1.	Sangat Setuju	5	25	125	25%
2.	Setuju	4	46	184	46%
3.	Netral	3	16	48	16%
4.	Tidak Setuju	2	10	20	10%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	3	3	3%
Jumlah			100	380	100%
Rata-rata skor = $\frac{\sum FX}{N} = \frac{380}{100} = 3,8$					
Rata-rata persentase = $\frac{3,8}{5} \times 100\% = 76\%$					

Sumber : Olah data kuesioner, Juni 2025

Tabel 22 menyajikan tanggapan dari 100 responden, yaitu 46% menyatakan “Setuju”, sementara 25% menyatakan “Sangat Setuju”. Sebanyak 16% responden memilih “Netral”, 10% “Tidak Setuju”, dan 3% menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Total skor keseluruhan yang diperoleh adalah 380, dengan rata-rata skor 3,8. Jika dikonversikan ke dalam persentase, rata-rata tanggapan responden

adalah sebesar 76% yang termasuk dalam kategori “Baik”.

Tabel 23. Rekapitulasi Indikator Penanggulangan Kemiskinan

No	Indikator penanggulangan kemiskinan	Rata-rata persentase
1.	Pelatihan keterampilan kerja	58%
2.	Diversifikasi ekonomi	73%
3.	Pemanfaatan teknologi digital	68%
4.	Kolaborasi Lintas Sektor	72%
	Jumlah	271/4
	Persentase	68%

Dengan mengakumulasi hasil rata-rata persentase dari delapan item pertanyaan pada indikator penanggulangan kemiskinan, maka di dapatkan hasil rata-rata persentase 68%. Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada indikator ini berada pada kategori “Baik”.

Adapun keseluruhan frekuensi dari penanggulangan kemiskinan adalah sebesar 2.721, untuk mengetahui jumlah persentase maka dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Hasil Ideal} &= \frac{\text{Total Frekuensi Jawaban}}{\text{Bobot Tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}} \\ &= \frac{2.721}{5 \times 8 \times 100} = \frac{2.721}{4.000} = 0,6802 \times 100\% = 68\% \end{aligned}$$

PENUTUP

Strategi pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dalam penelitian ini meliputi peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar, penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan UMKM dan perluasan lapangan kerja, serta penguatan tata kelola dan kepemimpinan dalam pelaksanaan program. Secara umum, strategi tersebut telah berjalan cukup baik dengan nilai rata-rata capaian sebesar 67% yang termasuk dalam kategori “Baik”. Namun demikian, keterbatasan infrastruktur fisik masih menjadi hambatan utama yang memerlukan perhatian serius karena berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada ringkasan model antara Strategi Pemerintah (X) dan Penanggulangan Kemiskinan (Y), diperoleh nilai R = 0,266, R Square = 0,071, dan Adjusted R Square = 0,061. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Strategi

Pemerintah (X) hanya mampu menjelaskan sebesar 7,07% variasi pada variabel Penanggulangan Kemiskinan (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, strategi pemerintah memiliki pengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan, namun kontribusinya masih relatif kecil sehingga diperlukan penguatan dan integrasi dengan kebijakan lain yang lebih komprehensif.

Faktor-faktor yang memengaruhi strategi pemerintah daerah menunjukkan bahwa kondisi lingkungan organisasi berada pada kategori cukup baik dengan nilai 75%. Akan tetapi, kualitas sumber daya manusia yang memperoleh nilai 64% masih menjadi tantangan yang perlu ditingkatkan untuk menunjang keberhasilan program, termasuk aspek kepemimpinan yang memperoleh nilai 72% dan berada pada kategori baik. Secara keseluruhan, rata-rata indikator variabel strategi pemerintah sebesar 70% termasuk dalam kategori “Baik”.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

- Variabel independen yang digunakan hanya berfokus pada strategi pemerintah daerah, sehingga belum mencakup faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan, seperti kondisi ekonomi makro, partisipasi masyarakat, dan kebijakan nasional.
- Nilai koefisien determinasi (R Square) yang relatif kecil (7,07%) menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain di luar model yang belum diteliti.
- Keterbatasan dalam cakupan wilayah dan jumlah responden dapat memengaruhi tingkat generalisasi hasil penelitian.
- Penggunaan instrumen kuesioner memungkinkan adanya subjektivitas dalam jawaban responden.

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, maka direkomendasikan:

- Penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel lain yang relevan, seperti partisipasi masyarakat, investasi daerah, pertumbuhan ekonomi, serta efektivitas kebijakan sosial untuk memperoleh model yang lebih komprehensif.
- Perluasan cakupan wilayah dan jumlah responden agar hasil penelitian lebih representatif.

- c) Penggunaan metode campuran (mixed methods) dengan wawancara mendalam atau studi kualitatif guna memperkaya analisis data kuantitatif.
- d) Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat pembangunan infrastruktur sebagai prioritas dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

John W. Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.

DAFTAR PUSTAKA

United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier – Human Development and the Anthropocene*. UNDP.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023*. Badan Pusat Statistik.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang. (2023). *Statistik Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang*. Diakses dari <https://sidenrengrappangkab.bps.go.id>

Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2021–2026*. Kabupaten Sidenreng Rappang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Amartya Sen. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Martha Nussbaum. (2000). *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge University Press.

Robert Putnam. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.

Michael P. Todaro, & Stephen C. Smith. (2012). *Economic Development (11th/12th ed.)*. Pearson Education.